

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggayam Tahun 2025 - 2029**" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Maksud dan tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai acuan dan dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan periode 5 tahun kedepan, serta memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan serta SKPD. Selain itu, dokumen juga berfungsi acuan demi terwujudnya dan kegiatan tahun 2025-2029 yang tersusun dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan Rencana kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan kegiatan Dinas Instansi Tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Karanggayam.

Hal-hal penting yang dimuat dalam Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 secara garis besar meliputi hal-hal antara lain: Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Karanggayam, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Renja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Penutup serta lampiran.

Kami menyadari atas kekurangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 ini sehingga kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan. Akhirnya atas bantuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra di ucapkan terima kasih.

Kebumen, 19 September 2025

CAMAT KARANGGAYAM



PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.Si

Pembina/ IV-a

NIP. 19851213 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KARANGGAYAM	8
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Karanggayam	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	30
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan	32
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .	33
2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	33
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	44
BAB III.....	46
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN KARANGGAYAM TAHUN 2025-2029.....	46
3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH	48
3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF.....	60
4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	68

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH 72

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 73

BAB V PENUTUP 74

LAMPIRAN 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Karanggayam Tahun 2025 Semester I	8
Tabel. 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanggayam Tahun 2024	10
Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Kecamatan Karanggayam Tahun 2025 ...	20
Tabel 2.4 Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	20
Tabel 2.5 Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	21
Tabel 2.6 Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasar Golongan Tahun 2025	22
Tabel 2.7 Aset Tanah Kecamatan Karanggayam	23
Tabel 2.8 Gedung dan Bangunan Kecamatan Karanggayam	24
Tabel 2.9 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanggayam	24
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam tahun 2021-2026	27
Tabel 2.11 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 2020-2025	28
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Karanggayam Tahun 2020-2025	30
Tabel 2.13 Kelompok Sasaran Layanan	32
Tabel 2.14 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	33
Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah ..	44
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam.....	47
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Karanggayam.....	48
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Karanggayam	49
Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Karanggayam	51
Tabel 4.2 Program Kecamatan Karanggayam	54
Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Karanggayam	55
Tabel 4.4 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.....	60
Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	68

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama..... 72

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Tahapan Penyusunan Renstra	3
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Karanggayam	8
Gambar 2.2 Bagan Struktur Perbup 86 Tahun 2016	19
Gambar 2.3 Pohon Masalah	35
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif

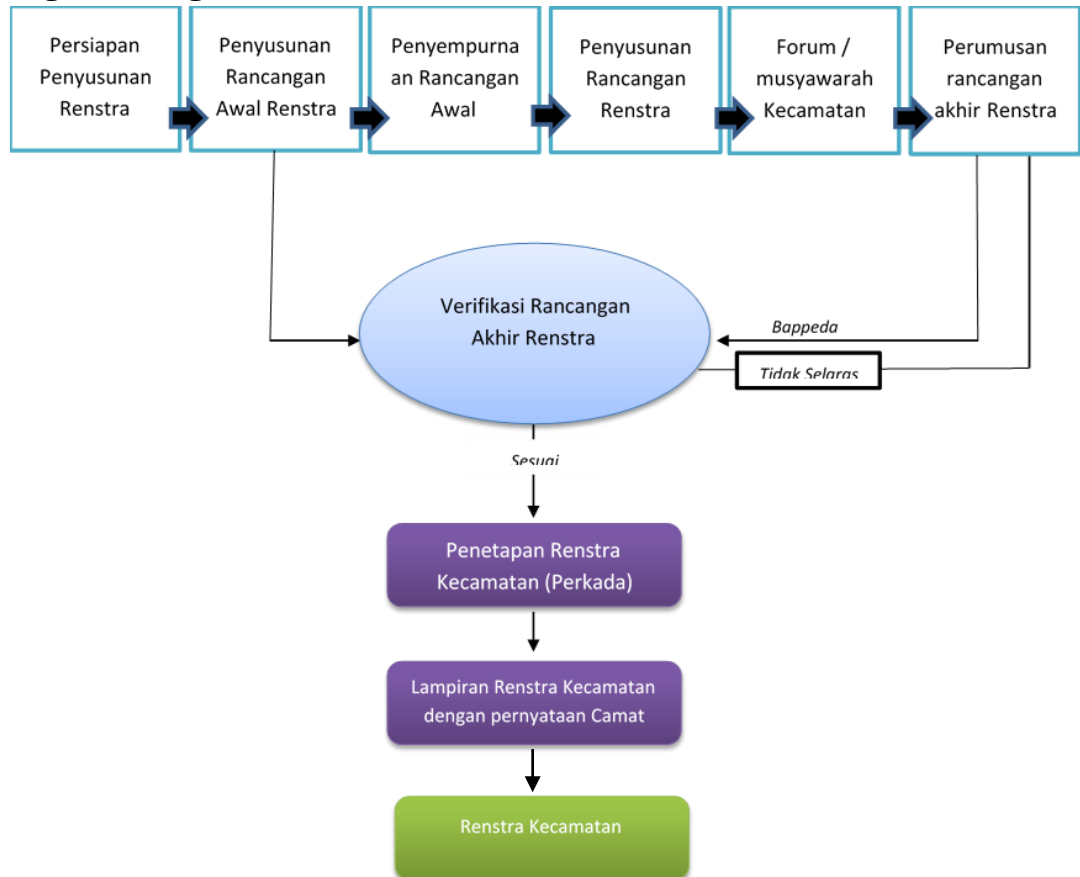
yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Karanggayam dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggayam untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peratiran Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karanggayam.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1
Gambar Tahapan Penyusunan Renstra

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029, landasan hokum yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
 25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Karanggayam
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karanggayam; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Karanggayam, kinerja pelayanan sampai saat ini, Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan pelayanan Kecamatan Karanggayam, dan Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan renstra Kecamatan Karanggayam, Sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam, Strategi Kecamatan Karanggayam dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 dan Arah kebijakan Kecamatan Karanggayam dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Bab V Penutup

Memuat kesimpulan penting substantif, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Lampiran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN KARANGGAYAM

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Karanggayam merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan terletak diantara lintang selatan dan bujur timur. Secara geografis Kecamatan Karanggayam terletak antara 70°38’-7°39’ lintang selatan dan 109°31’-109°38’ bujur timur. Dengan luas 10.929 hektar atau 109,29 km² terdiri dari tanah sawah sebesar 1.626,630 ha dan tanah kering 9.302,37 ha, batas wilayah Kecamatan Karanggayam adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sempor
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karangsambung
- 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Karanggayam

Gambaran Penduduk di Kecamatan Karanggayam sebagaimana tertuang dalam table berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Karanggayam Tahun 2025
Semester I

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Karanggayam	3.180	3.058	6.238
2.	Kajoran	2.033	1.962	3.995
3.	Karangtengah	427	412	839
4.	Karangmaja	856	803	1.659

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
5.	Penimbun	1.371	1.339	2.710
6.	Kalirejo	1.752	1.756	3.508
7.	Pagebangan	652	621	1.273
8.	Clapar	1.214	1.174	2.388
9.	Logandu	2.673	2.497	5.170
10.	Karangrejo	986	981	1.967
11.	Kebakalan	1.739	1.661	3.400
12.	Wonotirto	1.442	1.332	2.774
13.	Kalibening	1.807	1.793	3.600
14.	Gunungsari	2.464	2.250	4.714
15.	Ginandong	1.258	1.267	2.525
16.	Binangun	768	696	1.464
17.	Glontor	2.364	2.130	4.494
18.	Selogiri	2.923	2.805	5.728
19.	Giritirto	2.540	2.453	4.993
JUMLAH TOTAL		32.449	30.990	63.439

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementrian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester I

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Karanggayam Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Karanggayam berjumlah 63.190 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 32.331 jiwa dan Perempuan berjumlah 30.859 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Karanggayam terdiri dari Taman Kanak-Kanak 21, sekolah SD/Sederajat sebanyak 39, SMP/Sederajat sebanyak 9, SMA/Sederajat sebanyak 3.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Karanggayam terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah, yang terletak di Desa Karanggayam dan Desa Logandu. Puskesmas Pembantu sebanyak 2 buah yaitu di Desa Kalirejo dan Desa Selogiri. Puskesmas Karanggam I dan Karanggayam II melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, Pengobatan Umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Karanggayam ada pasar desa sebanyak 4 buah. Yang terletak di Desa Karanggayam, Desa Pagebangan, Desa Gunungsari dan desa Wonotirto. Sebagian besar menjual belikan hasil bumi dari pertanian yang dikelola masyarakat sekitar.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Karanggayam, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurus kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

Tabel. 2.2

Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanggayam
Tahun 2024

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Karanggayam	0,8800	0,5833	0,8000	0,7544			√	
2.	Kajoran	0,7143	0,7167	0,7333	0,7214			√	
3.	Karangtengah	0,8629	0,5500	0,6000	0,6710		√		
4.	Karangmaja	0,7714	0,7667	0,6000	0,7127			√	
5.	Penimbun	0,7543	0,6833	0,8667	0,7681			√	
6.	Kalirejo	0,7714	0,6000	0,6667	0,6794		√		
7.	Pagebangan	0,7886	0,7000	0,7333	0,7406			√	
8.	Clapar	0,7714	0,7167	0,5333	0,6738		√		
9.	Logandu	0,7943	0,6500	0,6667	0,7037		√		
10.	Kebakalan	0,7771	0,7000	0,6667	0,7146			√	
11.	Karangrejo	0,7943	0,6500	0,7333	0,7259			√	
12.	Wonotirto	0,7543	0,6833	0,7333	0,7237			√	
13.	Kalibening	0,7771	0,5833	0,8000	0,7202			√	
14.	Gunungsari	0,8400	0,8333	0,8000	0,8244				√
15.	Ginandong	0,7143	0,6000	0,8000	0,7048		√		
16.	Binangun	0,7200	0,5333	0,8667	0,7067		√		
17.	Glontor	0,7257	0,6333	0,8000	0,7197			√	
18.	Selogiri	0,8114	0,5833	0,7333	0,7094			√	
19.	Giritirto	0,8114	0,6333	0,8667	0,7705			√	

Sumber Sekretariat Kecamatan Karanggayam Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanggayam Tahun 2021 dari 6 (enam) desa dengan status berkembang, 12 (dua belas) desa dengan status maju dan 1 (satu) desa berstatus Mandiri.

Kondisi jalan Kecamatan sebagian besar sudah beraspal dan sebagian rusak sehingga lalu lintas kurang lancar, kondisi pelayanan berupa listrik 95%, akses internet sudah memadai.

Potensi Kecamatan Karanggayam antara lain obyek wisata budaya 2 obyek yaitu makam mbah agung dan makam suropati. Obyek wisata cagar alam ada 3 obyek yaitu pager jawa dan bukit menyan, Puragga Park.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Fungsi

Kecamatan Karanggayam, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Karanggayam dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Karanggayam berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di

bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan

pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan

pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

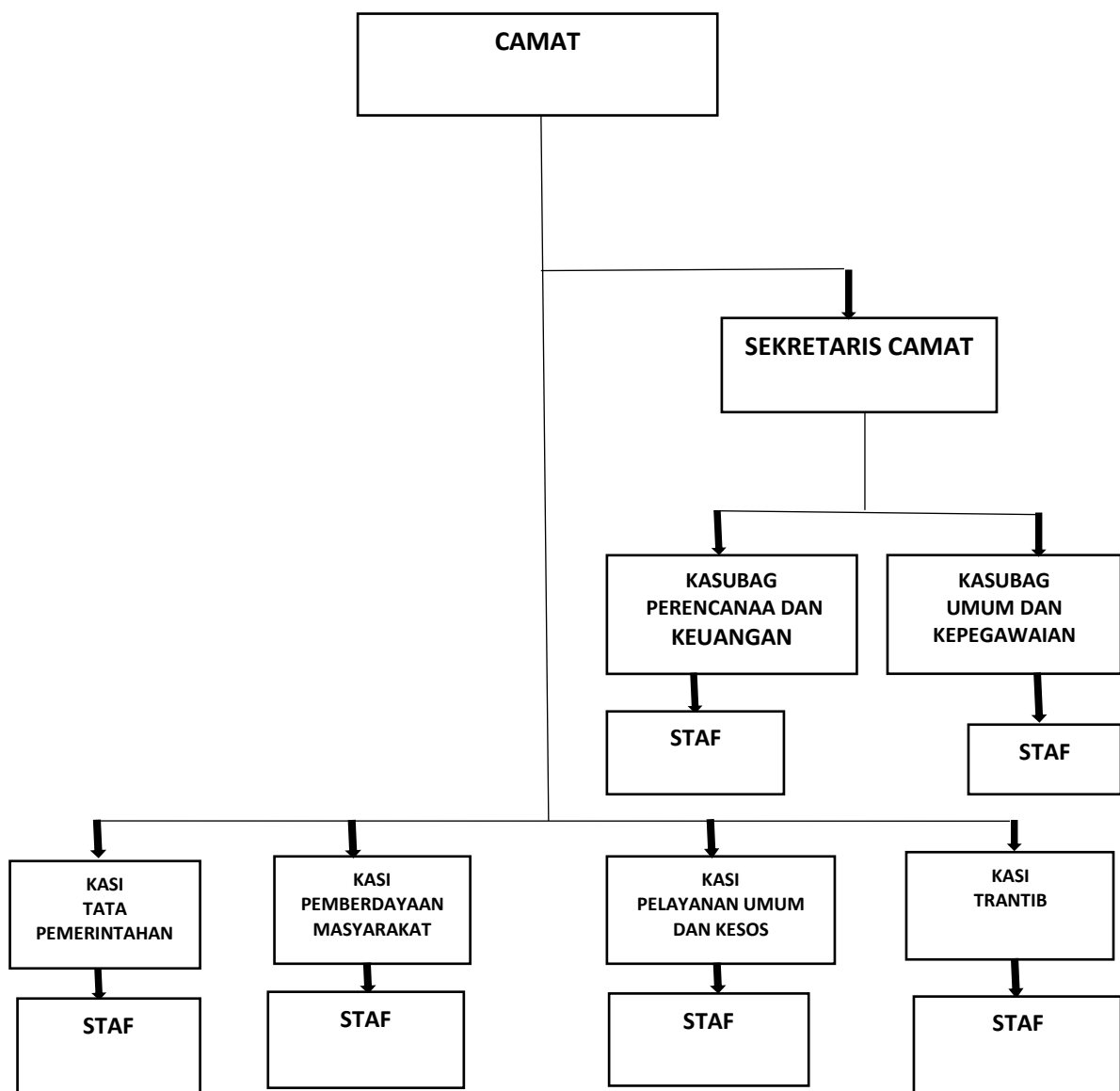
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.2
Bagan Struktur Perbup 86 tahun 2016

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Karanggayam

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Karanggayam berjumlah 21 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 5 orang Petugas Penunjang Kegiatan. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Kecamatan Karanggayam
Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	12	11	11	13	10
Perempuan	1	3	3	3	6
Jumlah ASN	13	14	14	16	16

Sumber : Sekretariat Kecamatan Karanggayam

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah struktural dan fungsional dapat dilihat di Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasar Jenis Kelamin
Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Camat	√		1
2	Sekretaris Camat	-	-	-
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	√	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	√		1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	√		1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan	√		1

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
	Kesejahteraan Sosial			
9.	Staf	√	√	11
Jumlah		10	6	16
Presentase		62,5%	37,5%	100%

Sumber : Sekretariat Kecamatan Karanggayam

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Karanggayam terdapat 3 (tiga) jabatan kosong yaitu Sekretaris Camat, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban. Hal ini ada sedikit berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Karanggayam.

- a. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Karanggayam dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 2.5

Tabel 2.5
Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-II	SLTA	
1	Camat	√					1
2	Sekretaris Camat						-
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian					√	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						-
5	Kasi Tata Pemerintahan		√				1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		√				1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban						-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	√					1
9	Staf		√			√	11
Jumlah							16

Sumber: Sekretariat Kecamatan Karanggayam, September 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.5 tingkat pendidikan Karyawan Kecamatan Karanggayam yang paling banyak adalah SMA/SLTA. Jumlah karyawan yang menyelesaikan pendidikan S2 hanya 2 orang, dan karyawan yang menyelesaikan S1 sejumlah 4 orang, hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok Kecamatan Karanggayam.

- b. Pegawai Berdasar Golongan
- Gambaran Pegawai Kecamatan Karanggayam berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Pegawai Kecamatan Karanggayam Berdasar Golongan
Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				√	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-
4	Subbag Umum dan Kepegawaian			√		1
5	Seksi Tata Pemerintahan			√		1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			√		1
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial				√	1
Jumlah				3	2	5
Persentase				60%	40%	100%

Sumber : Kecamatan Karanggayam, September 2025

Berdasarkan Tabel 2.6 terdapat 2 orang pegawai Kecamatan Karanggayam termasuk dalam Golongan IV, yaitu Camat dan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, untuk pegawai yang termasuk dalam Golongan III terdapat 3 orang, yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Tata Pemerintahan dan Seksi Pembedayaan Masyarakat.

B. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.7
Aset Tanah Kecamatan Karanggayam

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.063	2013	Jl Karanggayam Km 2, Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam	Pemda Kab Kebumen	-	-	-	Pembelian	Rp425.706.009,00	

Sumber: Pengelola BMD Kecamatan Karanggayam, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Karanggayam memiliki tanah bangunan kantor pemerintah yang berasal dari pembelian dengan luas 4.063m² yang beralamat di Jalan Karanggayam Km 2, Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam yang merupakan Hak Pemda Kabupaten Kebumen pengadaan pada tahun 2013.

Tabel 2.8
Gedung dan Bangunan Kecamatan Karanggayam

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	36	Jl Karanggayam Km 2, Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam	36	Pemda Kebumen	Pembelian	Rp1.028.938.374,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik		Jl Karanggayam Km 2, Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam		Pemda Kebumen	Pembelian	Rp971.868.600,00	

Sumber: Pengelola BMD Kecamatan Karanggayam, 2025

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa Kecamatan Karanggayam memiliki dua gedung kantor dalam kondisi baik yang berlokasi di Jalan Karanggayam Km 2, Desa Karanggayam. Gedung Kantor Permanen memiliki luas lantai dan bangunan 36 m², dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kebumen yang diperoleh melalui pembelian senilai

Rp1.028.938.374,00. Selain itu, terdapat Gedung Kantor Lain-Lain dengan status tanah dan asal usul yang sama, senilai Rp971.868.600,00. Data ini mencerminkan keberadaan aset gedung yang terawat dan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sesuai dengan rencana strategis.

Tabel 2.9
Sumber Daya Sarana Prasarana Kecamatan Karanggayam
Tahun 2025

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEME LIHAR AAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung	1			1	1		1
Rumah Dinas	1			1	1		1
Kendaraan							
Mobil	1			1	1		1
Sepeda Motor	4	3		7	15	8	15
Sepeda motor Kades	19			19	19		19
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop	13			13	15	3	15
Printer Scan Copy	3		2	5	7	2	7
Wastafel	2			2	5	3	5
Printer	2			2	2		2
PC unit	2	1		3	5	2	5
Personal Komputer lainnya	9			9	10	1	9
LCD Proyektor	1	4		5	7	2	7
Wireles	5			5	8	3	8
Televisi	2			2	2		2
Sound Sytem	2		1	3	4	1	4
Microphone	2		1	3	8	5	8
AC	8			8	8		8
Kipas Angin	4	1	1	6	8	2	8
Dispenser	2			2	2	2	2
Generator	1			1	1	1	1
Unit Tranceiver Ssb Portabel	1			1	1		1
Mesin Pemotong Rumput	1			1	2	1	2
Lemari Kayu	5	1		6	9	3	9
Rak Besi	7			7	8	1	8
Rak Kayu	1			1	3	2	3
Filling Cabinet Besi		10		10	12	2	12
Papan Visual/Papan Nama	2			2	3	1	3
White Board	2			2	2		2
Papan Pengumuman	1			1	2	1	2
Meja Kerja Kayu	10			10	12	2	12

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEME LIHAR AAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Kursi Besi/Metal	2			2	5	3	5
Meja Rapat	12			12	15	3	15
Meja Telepon	2			2	2		2
Meja Resepsionis	2			2	4	2	4
Meja Panjang	2			2	4	2	4
Kursi Fiber Glas/Plastik	50	50	15	115	115	115	115
Kursi Rapat	60	16		76	150	74	150
Kursi Tamu	7			7	9	2	9
Kursi Putar	9			9	10	1	10
Kursi Biasa	4			4	8	4	8
Bangku Tunggu	1			1	4	3	4
Sofa	2			2	2		2
Mimbar/Podium	1			1	2	1	2
Meja Kerja Pejabat Eselon	7			7	9	2	9
Kursi Kerja Pejabat Eselon	7			7	9	2	9
Kursi Tamu di Ruangan Tunggu	2			2	3	1	3
Lemari Buku Arsip	6			6	8	2	8
Kursi roda	1			1		1	1
Alat untuk bermain anak	3			3	8	5	3

Sumber : Sekretariat Kecamatan Karanggayam, September 2025

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Karanggayam cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja dan standar pelayanan publik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Karanggayam menetapkan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai acuan evaluasi. Tingkat pencapaian indikator tersebut selama periode 2021–2026 dapat dilihat pada Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 2021–2026 dan Tabel 2.10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 2020–2025 sebagai berikut.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	2021	2022	2023	2024	2025*	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan															-							-	
a.	Indeks Reformasi Birokrasi				Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	N/A	N/A	100,35%	102,41%	111,97%	131,24%	N/A	N/A	
	Indikator Sasaran															-								
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	N/A	102%	106%	107%	106%*	106%	N/A	
b.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam				Indeks	84,00	85,80	86,30	87,50	90,43	90,45	86,27	94,47	87,69	91,25	93,45	N/A	102,70%	110,10%	101,61%	104,28	103,34%	N/A	

Sumber: Renja Kecamatan Karanggayam, 2025

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Berdasarkan Tabel 2.10 capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam selama periode 2021–2024 secara umum berada pada kategori sangat baik dan cenderung melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari seluruh indikator utama yang memiliki persentase capaian di atas 100 persen. Pada indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, realisasi kinerja menunjukkan peningkatan signifikan dan konsisten. Hingga tahun 2024, realisasi mencapai 85,74 dengan persentase capaian sebesar 131,24 persen. Capaian tersebut mengindikasikan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh perbaikan tata kelola pemerintahan, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan kinerja yang optimal. Realisasi capaian selama periode evaluasi berada di atas target dengan persentase capaian berkisar antara 102 hingga 107 persen. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan responsivitas aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam memperlihatkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan, dengan persentase capaian di atas 100 persen setiap tahun. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam peningkatan mutu pelayanan dan keberhasilan perangkat daerah dalam menjaga kepuasan masyarakat.

Tabel 2.11
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Cakupan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renja Kecamatan Karanggayam 2025

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Berdasarkan Tabel 2.11, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanggayam selama periode 2020–2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten. Seluruh program yang dilaksanakan mampu mencapai target kinerja sebesar 100 persen setiap tahunnya, baik dari sisi target, realisasi, maupun rasio capaian. Capaian kinerja yang stabil hingga tahun 2025 (angka perkiraan) menjadi dasar yang kuat bagi Kecamatan Karanggayam dalam mempertahankan kinerja pelayanan dan sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan dan program pada periode perencanaan selanjutnya.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan Kecamatan Karanggayam dalam mengelola sumber daya keuangan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode tahun 2020–2025. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya.

Melalui pengelolaan anggaran yang baik, diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggayam dapat mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan. Berikut disajikan data mengenai besaran anggaran dan realisasi program serta kegiatan Kecamatan Karanggayam selama tahun 2020–2025.

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Karanggayam Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025*			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.749.546.000	1.696.212.968	96,95	1.878.535.000	1.804.598.320	96,06	1.896.004.000	1.776.820.525	93,71	2.153.175.000	2.002.915.963	93,02	2.265.751.000	1.600.038.743	70,62	29,51%	-6%
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	18.165.000	18.165.000	100	38.289.000	38.133.650	99,59	33.715.000	33.538.600	99,48	33.851.000	33.851.000	100	7.527.000	6.597.706	87,65	-58,56%	-64%
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.559.960.000	1.509.604.214	96,77	1.680.175.000	1.613.872.717	96,05	1.741.583.000	1.627.365.732	93,44	1.905.437.000	1.762.748.653	92,51	2.027.502.000	1.418.773.024	69,98	29,97%	-6%
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.314.000	51.312.200	100	51.000.000	50.738.600	99,49	44.547.000	44.172.400	99,16	58.257.000	54.463.400	93,49	35.814.000	31.143.531	86,96	-30,21%	-39%
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	19.865.000	99,33	10.000.000	10.000.000	100	-	-	-	32.330.000	32.329.800	100	30.000.000	29.640.000	98,8	50,00%	49%
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.500.000	46.664.554	94,27	54.500.000	47.422.353	87,01	51.880.000	47.636.902	91,82	75.448.000	72.922.610	96,65	109.863.000	68.165.218	62,05	121,95%	46%
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.607.000	50.602.000	99,99	44.571.000	44.431.000	99,69	24.279.000	24.106.891	99,29	47.852.000	46.600.500	97,38	55.045.000	45.719.246	83,06	8,77%	-10%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	103.364.000	103.358.000	99,99	84.276.000	82.734.702	98,17	85.890.000	85.240.000	99,24	1.623.650.000	1.582.402.100	97,46	38.450.000	14.237.741	37,03	-62,80%	-86%

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025*			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	103.364.000	103.358.000	99,99	84.276.000	82.734.702	98,17	85.890.000	85.240.000	99,24	1.623.650.000	1.582.402.100	97,46	38.450.000	14.237.741	37,03	-62,80%	-86%
3	Program koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.235.000	34.235.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.235.000	34.235.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	9.250.000	9.248.900	99,99	13.250.000	13.236.600	99,9	12.797.000	12.397.000	96,87	34.768.00	34.768.000	100	26.182.000	25.190.750	96,21	183,05%	172%
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.250.000	9.248.900	99,99	13.250.000	13.236.600	99,9	12.797.000	12.397.000	96,87	34.768.00	34.768.000	100	26.182.000	25.190.750	96,21	183,05%	172%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	95.693.000	95.614.900	99,92	118.259.000	116.257.150	98,31	189.080.000	184.272.900	97,46	146.000.000	144.634.500	99,06	119.201.000	68.284.155	57,28	24,57%	-29%
	a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.693.000	95.614.900	99,92	118.259.000	116.257.150	98,31	189.080.000	184.272.900	97,46	146.000.000	144.634.500	99,06	119.201.000	68.284.155	57,28	24,57%	-29%

Sumber: Data Diolah, Kecamatan Karanggayam, 2025

Keterangan: *) Angka Perkiraan

Berdasarkan Tabel 2.12 terjadi kenaikan dan penurunan pada realisasi program dari tahun 2020-2025. Terdapat kenaikan pertumbuhan positif dan terdapat penurunan realiasi atau capaian kinerja. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi baik dari internal Kecamatan Karanggayam maupun eksternal Kecamatan Karanggayam. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan Kecamatan Karanggayam selama periode 2020-2024 secara umum menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, dengan capaian kinerja keuangan pada sebagian besar program berada di atas 90 persen. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan relatif efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar dan menunjukkan realisasi yang konsisten, dengan capaian kinerja keuangan berkisar antara 93 hingga 96 persen pada periode 2021-2024. Namun pada tahun 2025 (angka perkiraan), karena masih dalam proses realisasi.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, realisasi anggaran dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan capaian kinerja di atas 97 persen. Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi seiring dengan penyesuaian anggaran, capaian kinerja program tetap berada pada kategori cukup, yang mencerminkan upaya efisiensi dan penyesuaian prioritas program. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 persen pada tahun pelaksanaan, yang menandakan bahwa kegiatan dilaksanakan secara penuh sesuai perencanaan meskipun dengan keterbatasan variasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memperlihatkan kinerja anggaran yang sangat baik dengan capaian kinerja mendekati atau mencapai 100 persen setiap tahunnya. Peningkatan anggaran pada periode 2024–2025 diikuti dengan realisasi yang optimal, menunjukkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tinggi hingga tahun 2024, namun mengalami penurunan pada tahun 2025 seiring dengan penyesuaian anggaran dan ruang fiskal. Meskipun demikian, kegiatan utama tetap terlaksana dan mendukung fungsi pembinaan serta pengawasan desa.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Karanggayam merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan program, kegiatan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan. Penetapan kelompok sasaran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap layanan dapat diorientasikan secara tepat, efektif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Karanggayam.

Tabel 2.13 Kelompok Sasaran Layanan

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya.	Masyarakat Umum
2	Fasilitasi, pembinaan, serta koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.	Pemerintah Desa
3	Layanan afirmatif dan perlindungan sosial.	Kelompok Rentan (Lansia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan kondisi

		sosial ekonomi terbatas)
4	Layanan kemudahan berusaha, koordinasi pendampingan, serta dukungan iklim usaha yang kondusif.	Pelaku usaha dan dunia usaha lokal
5	Pelaksanaan tugas koordinasi, integrasi program, serta penyampaian data dan informasi pembangunan di wilayah kecamatan.	Perangkat Daerah Kabupaten

Sumber: Data Diolah, Kecamatan Karanggayam, 2025

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

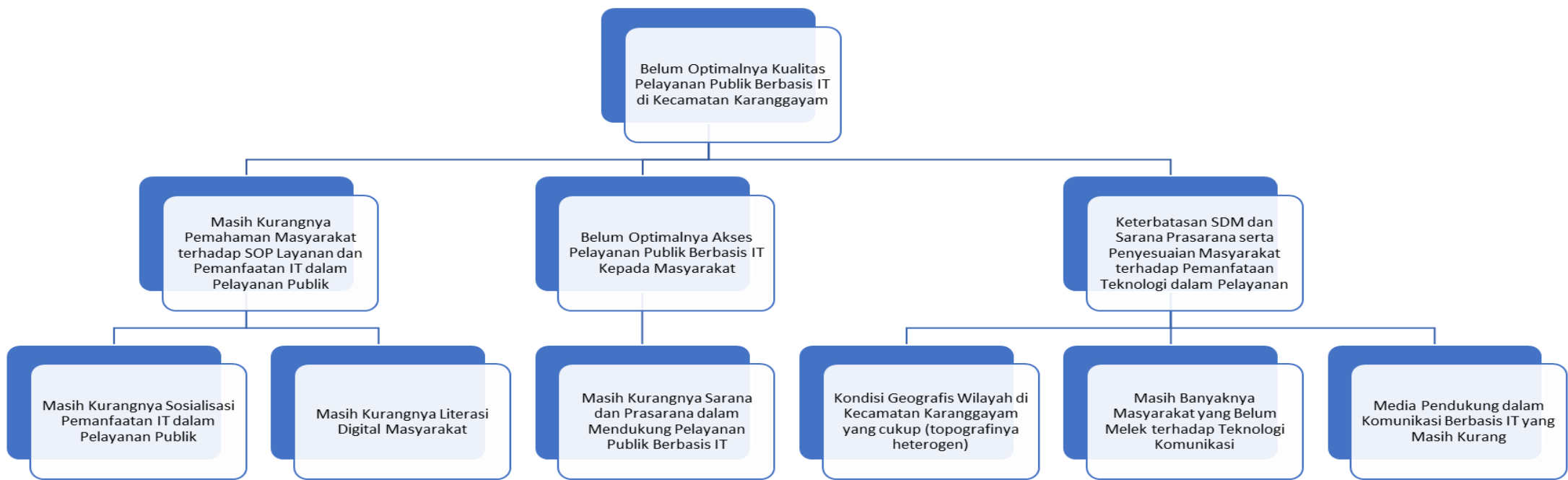
A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Tabel 2.14 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT di Kecamatan Karanggayam	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP layanan dan pemanfaatan IT dalam pelayanan publik	Masih kurangnya sosialisasi pemanfaatan IT dalam pelayanan publik
			Masih kurangnya literasi digital masyarakat
		Belum optimalnya akses pelayanan publik berbasis IT kepada masyarakat	Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayaan publik berbasis IT
			Kondisi geografis wilayah di Kecamatan Karanggayam yang cukup (topografinya heterogen)
		Keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta	Masih banyaknya masyarakat yang belum melek

		penyesuaian masyarakat terhadap peman	terhdapat teknologi komunikassi
			Media pendukung dalam komunikasi berbasis IT yang masih kurang

Gambar 2.3 Pohon Masalah



Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Karanggayam, antara lain:

- 1) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- 2) Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- 3) Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Karanggayam dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- 5) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 6) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam pembangunan.

B. Telaah

1. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

2. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Karanggayam merupakan Pusat Pelayanan Lingkungan. Sistem Jaringan

Transportasi yang dimiliki oleh Kecamatan Karanggayam yaitu Terminal Penumpang Tipe C. Sistem Jaringan telekomunikasi Kecamatan Karanggayam merupakan Jaringan Tetap.

Dengan mengacu pada perda tersebut, arah kebijakan Kecamatan Karanggayam dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Mendorong pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi lokal.
- 2) Mengembangkan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata alam/geologi yang berkelanjutan.
- 3) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pengelolaan kawasan lindung dan hutan produksi.
- 4) Meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan wilayah melalui dukungan terhadap fungsi pertahanan dan kesiapsiagaan bencana.
- 5) Mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar instansi dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.

4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Karanggayam, yaitu:

- 1) Ancaman bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan
- 2) Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Karanggayam meliputi:

- 1) konservasi hutan lindung, rehabilitasi lahan kritis, pembangunan drainase lereng, dan sistem peringatan dini (*early warning*).
- 2) Pembangunan embung (tercantum dalam RTRW seperti Embung Giritirto dan Embung Kalirejo di Karanggayam

pada Perda Nomor 1 Tahun 2024), serta normalisasi saluran air dan vegetasi penahan erosi.

- 3) Patroli masyarakat peduli api, reboisasi, dan pengawasan aktivitas pembukaan lahan.

5. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Kabupaten Kebumen tahun 2025 – 2029 yaitu Kebumen Berdaya. Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
- 2) **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas

menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

- 3) **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
- 4) **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) **MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

- 2) **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
- 3) **MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.
- 4) **MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 5) **MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.** Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian

tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Karanggayam mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Karanggayam. Berikut adalah peranan Kecamatan Karanggayam yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1) ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan. Kecamatan Karanggayam berperan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2) Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kecamatan Karanggayam berperan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

3) Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya. Kecamatan Karanggayam berperan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Karanggayam, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Karanggayam.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.15
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan keterlibatan serta peran masyarakat dalam pembangunan

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat disimpulkan isu strategis Kecamatan Karanggayam sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat
- 2) Peningkatan tata kelola kecamatan
- 3) Pengembangan potensi wilayah
- 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 5) Peningkatan keterlibatan serta peran masyarakat dalam pembangunan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN KARANGGAYAM TAHUN 2025-2029

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah : mendukung Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.

Sasaran jangka menengah Kecamatan Karanggayam adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karanggayam

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	90,43	90,45	90,47	90,50	90,55	90,60
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Karanggayam	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanggayam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dari tahun 2025 – 2029 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2026 sebesar 90,45; target sasaran di tahun 2027 sebesar 90,47; target sasaran di tahun 2028 sebesar 90,50; target sasaran di tahun 2029 sebesar 90,55; target sasaran di tahun 2030 sebesar 90,60. Sasaran Jangka Menengah Tata Kelola Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dari tahun 2025 – 2029 berupa meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Karanggayam, dengan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanggayam yang menargetkan sasaran di tahun 2026 sebesar 100,00; target sasaran di tahun 2027 sebesar 100,00; target sasaran di tahun 2028 sebesar 100,00; target sasaran di tahun 2029 sebesar 100,00.

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Karanggayam dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Karanggayam

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karanggayam selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kulailitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Karanggayam sebagai berikut.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Karanggayam

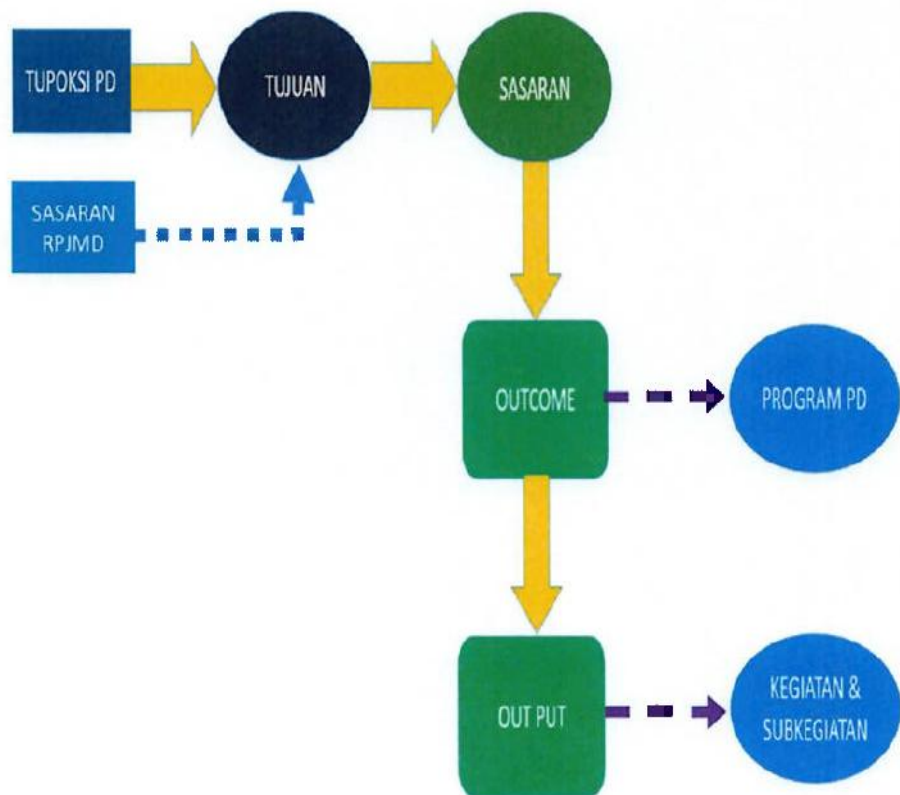
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Karanggayam guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi 4 Program, 9 Kegiatan dan 31 subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Karanggayam. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Karanggayam dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Berikut merupakan Tabel 4.1 yang memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Karanggayam sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Kecamatan Karanggayam

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Perangkat Daerah; 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 5. Penyediaan Bahan / Material; 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel; 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		Lainnya; 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan; 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Karanggayam. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Karanggayam tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Program Kecamatan Karanggayam

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 KECAMATAN					2.471.115.255,00		2.543.759.452,00		2.629.646.398,00		2.733.531.877,00		2.804.190.679,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					2.335.115.255,00		2.400.759.452,00		2.493.646.398,00		2.591.531.877,00		2.662.190.679,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan : Nilai)	72,30	72,35	72,40	2.335.115.255,00	72,45	2.400.759.452,00	72,51	2.493.646.398,00	73,76	2.591.531.877,00	75,00	2.662.190.679,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya penanganan pengaduan Masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN					98.000.000,00		105.000.000,00		98.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DESA														
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecsmatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	100,00	98.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	98.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Berikut merupakan tabel teknis merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Kecamatan Karanggayam:

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Karanggayam

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karanggayam				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam		
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Karanggayam			Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanggayam		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan : Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terdaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terdaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terdaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Pemerintah Daerah			
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terdaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Terdaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	

NSPK dan Sasaran RPMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
						Jabatan	
			Terdaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen)	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
				Terdaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Presentase Terdaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen)	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
				Terdaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APEDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APEDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen)	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

NSPK dan Sasaran RRUMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terdaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan: Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Berikut merupakan tabel uraian subbkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif renstra Kecamatan Karanggayam tahun 2025-2029.

Tabel 4.4
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen

2025-12-08

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.471.115.255		2.543.759.452		2.629.646.398		2.733.531.877		2.804.190.679		
7.01	KECAMATAN				2.471.115.255		2.543.759.452		2.629.646.398		2.733.531.877		2.804.190.679		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.335.115.255		2.400.759.452		2.493.646.398		2.591.531.877		2.662.190.679	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Nilai) (Dengan Satuan:Nilai)	72,30	72,35	72,40		72,45		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		Kapala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.996.472.510		2.056.284.570		2.137.534.303		2.222.503.320		2.285.111.265	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kapala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.979.044.557		2.038.415.895		2.118.903.066		2.203.290.512		2.265.018.850	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	18	22		25		25		25		25		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					17.427.953		17.868.675		18.631.237		19.212.808		20.092.415	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.000.000		32.000.000		39.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.000.000		8.000.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.000.000		3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	5	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		15.000.000		0		10.000.000		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Mebeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		3		0		2		0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.500.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	5	3		2		3		3		3		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					9.500.000		0		10.000.000		0		10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	3		0		3		0		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					207.642.745		213.474.882		218.112.095		228.028.557		232.079.414	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					173.642.745		179.474.882		184.112.095		193.028.557		197.079.414	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.000.000		56.000.000		56.000.000		58.000.000		62.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		44.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	16		16		16		16		16		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	3	4		3		3		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Indeks) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. (Dengan Satuan:Kegiatan)	16	16	16		16		16		16		16		Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	16	16	16		16		16		16		16		Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					98.000.000		105.000.000		98.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Karanggayam yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					98.000.000		105.000.000		98.000.000		100.000.000		100.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaham Desa (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Tata Pemerintahan.
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasi Tata Pemerintahan.
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan.
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		7.000.000		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan.
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan.
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasi Tata Pemerintahan.
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan.
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					39.000.000		39.000.000		39.000.000		40.000.000		40.000.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					8.000.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000	Kasi Tata Pemerintahan.
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan.
			TOTAL:		2.471.115.255		2.543.759.452		2.629.646.398		2.733.531.877		2.804.190.679		

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai upaya mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Karanggayam menetapkan sejumlah subkegiatan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Rincian subkegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah berikut ini.

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas		Outcome		Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Perangkat Daerah	Kualitas Kinerja	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Penyediaan Barang Cetak dan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/ Subkegiatan (4)	Ket (5)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tolok ukur kinerja setiap sasaran strategis. IKU ini disusun secara terukur dan relevan dengan tugas serta fungsi perangkat daerah, sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja secara objektif. Berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Tujuan								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	%	90,43	90,45	90,47	90,50	90,55	90,60	
	Indikator Sasaran								
1.	Indeks Tata Kelola Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Karanggayam selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi”.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2026, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.

Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Karanggayam berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Karanggayam berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun

dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggayam Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, Kecamatan Karanggayam memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pembinaan masyarakat, serta koordinasi antar perangkat daerah dan pemerintahan desa. Berikut merupakan penyelarasan renstra Kecamatan Karanggayam terhadap RPJMD 2025-2029.

1. Keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Keterpaduan Tujuan dan Sasaran
3. Keselarasan Program dan Kegiatan
4. Arah Kebijakan Kecamatan

Karanggayam, 19 September 2025

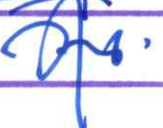
Camat Karanggayam



Pradipta Anggi Wirasanto, S.STP., M.Si

Pembina/IV-a

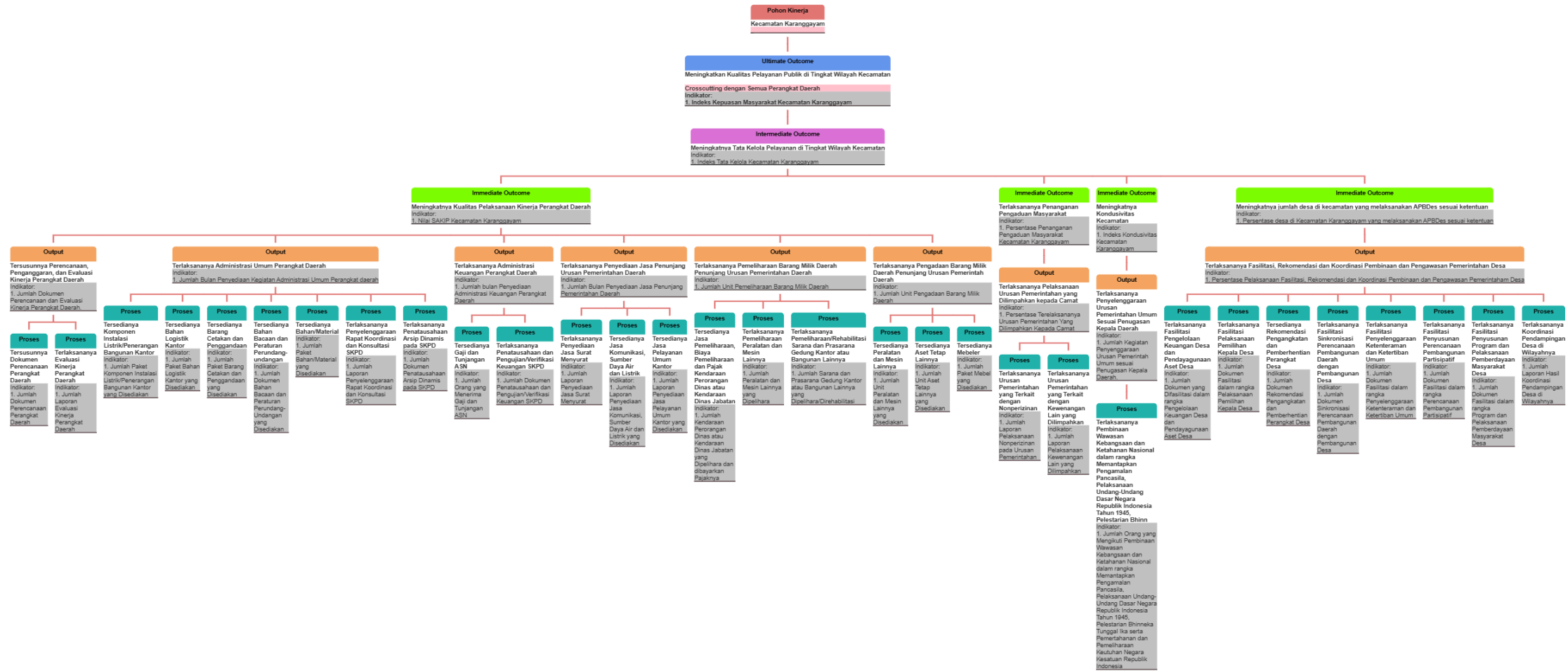
NIP. 198512132006021001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Hentari Mattademi	

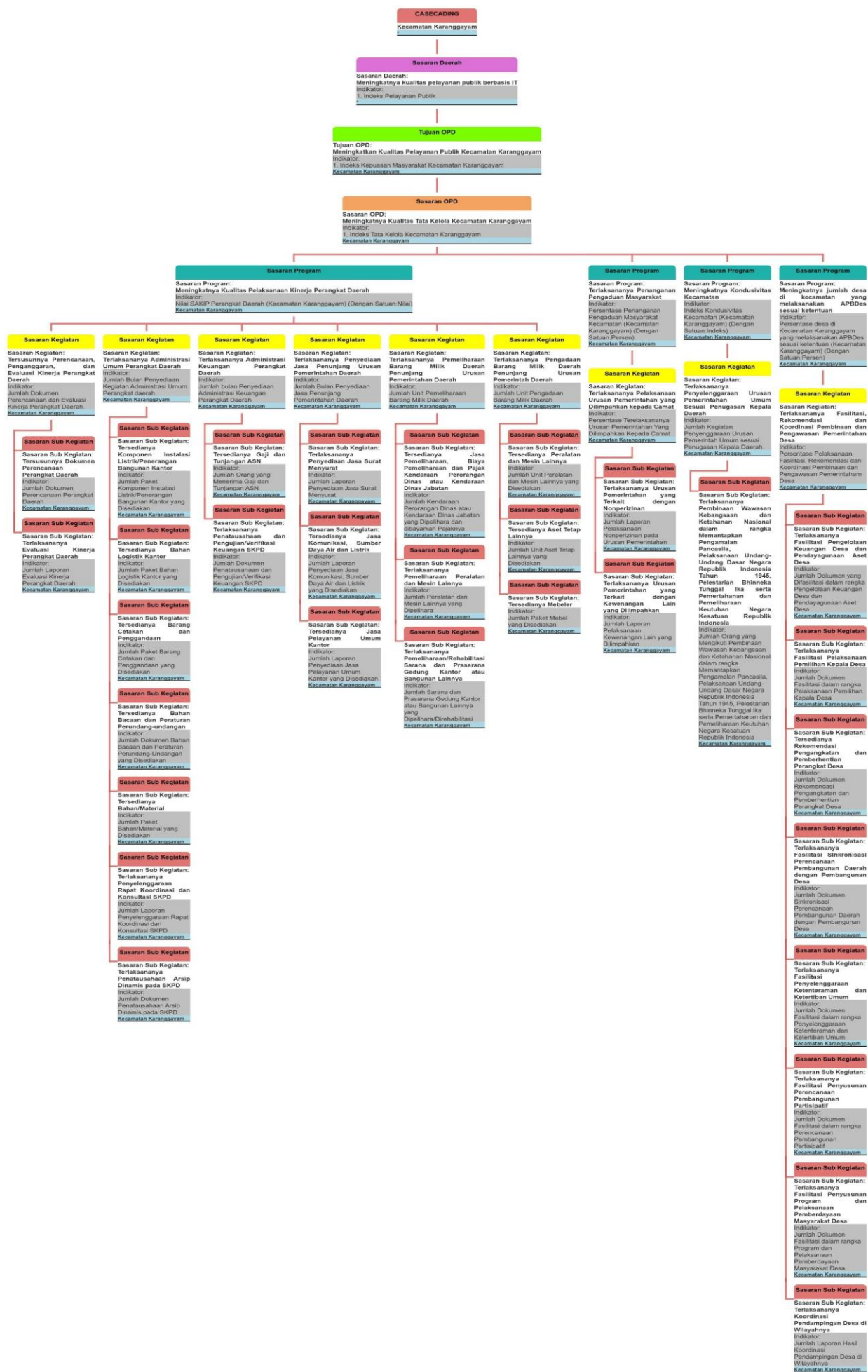
LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja Kecamatan Karanggayam
2. Casecading Kecamatan Karanggayam
3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Karanggayam
4. Rumus Perhitungan Indikator Kecamatan Karanggayam
5. SK Penyusunan Renstra Kecamatan Karanggayam
6. Dokumentasi Pelaksanaan Forum Renstra Kecamatan Karanggayam

Pohon Kinerja Kecamatan Karanggayam



Casecading Kecamatan Karanggayam



Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Karanggayam

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen

2025-12-08

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.471.115.255		2.543.759.452		2.629.646.398		2.733.531.877		2.804.190.679		
7.01	KECAMATAN				2.471.115.255		2.543.759.452		2.629.646.398		2.733.531.877		2.804.190.679		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.335.115.255		2.400.759.452		2.493.646.398		2.591.531.877		2.662.190.679	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Nilai) (Dengan Satuan:Nilai)	72,30	72,35	72,40		72,45		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		Kapala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.996.472.510		2.056.284.570		2.137.534.303		2.222.503.320		2.285.111.265	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kapala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.979.044.557		2.038.415.895		2.118.903.066		2.203.290.512		2.265.018.850	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	18	22		25		25		25		25		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					17.427.953		17.868.675		18.631.237		19.212.808		20.092.415	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan punya Kegiatan antara lain : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.000.000		32.000.000		39.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.000.000		8.000.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.000.000		3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	5	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		15.000.000		0		10.000.000		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Mebeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		3		0		2		0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.500.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	5	3		2		3		3		3		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					9.500.000		0		10.000.000		0		10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	3		0		3		0		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					207.642.745		213.474.882		218.112.095		228.028.557		232.079.414	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					173.642.745		179.474.882		184.112.095		193.028.557		197.079.414	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.000.000		56.000.000		56.000.000		58.000.000		62.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		44.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	14	14	16		16		16		16		16		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	3	4		3		3		4		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terelaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					18.000.000		18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Indeks) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. (Dengan Satuan:Kegiatan)	16	16	16		16		16		16		16		Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	16	16	16		16		16		16		16		Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					98.000.000		105.000.000		98.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Karanggayam yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan:Persen) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					98.000.000		105.000.000		98.000.000		100.000.000		100.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaham Desa (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		Kasi Tata Pemerintahan.
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasi Tata Pemerintahan.
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan.
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		7.000.000		0		0		0	Kasi Tata Pemerintahan.
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		Kasi Tata Pemerintahan.
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kasi Tata Pemerintahan.
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan.
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					39.000.000		39.000.000		39.000.000		40.000.000		40.000.000	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					8.000.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000	Kasi Tata Pemerintahan.
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kasi Tata Pemerintahan.
			TOTAL:		2.471.115.255		2.543.759.452		2.629.646.398		2.733.531.877		2.804.190.679		

Rumus Perhitungan Indikator Kecamatan Karanggayam

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGGAYAM

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT				
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan

					pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanggayam (Dengan Satuan: Persen)	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen

					Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100%
--	--	--	--	--	---

					Sumber data ; Kecamatan Penanggung Jawab; Camat
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan: Nilai)	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah.

					Penanggung Jawab; Camat Karanggayam
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan: Persen)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Karanggayam Penanggung Jawab; Camat Karanggayam
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan: Persen)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Karanggayam Penanggung Jawab; Camat Karanggayam

1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Karanggayam yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan (Kecamatan Karanggayam) (Dengan Satuan: Persen)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Karanggayam Penanggung Jawab; Camat Karanggayam
---------	--	--	---	--	--

Dokumentasi Forum Renstra Kecamatan Karanggayam



